

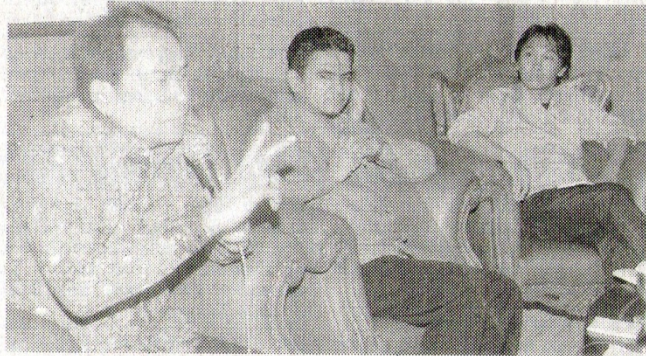
Generasi muda terkendala dominasi tokoh politik tua

SENAYAN (Pos Kota) – Alih generasi pimpinan nasional kepada generasi muda saat ini terkendala oleh dominannya kaum tua dalam pentas politik nasional. Calon-calon pemimpin bangsa dari kalangan muda, kini cenderung dilemahkan.

“Sekarang ini makin menguat ideologi Bapakisme yang dikuasai kaum tua. Mereka menempati posisi-posisi penting dalam parpol, sehingga nyaris tidak memberi ruang kepada kaum muda untuk tampil jadi pemimpin,” kata sejarawan JJ Rizal dalam diskusi di MPR, Senin (29/10).

Kaum muda sekarang justru malah diajari model-model transaksi dalam berbagai kepentingan. Pada akhirnya, calon pemimpin dari kalangan muda ini terjebak dalam arus kompromi-kompromi, dan pada akhirnya bertindak sangat konservatif. “Mereka menjadi serba penurut, tak berdaya,” katanya.

Selain itu, kalau ada yang tampil ke depan, adalah kaum muda yang memang punya darah dari tokoh berposisi sangat menentukan dalam parpol. “Padahal, dari segi kualitas, anak muda seperti ini belum pantas



Aziz Syamsuddin (Anggota F-PG MPR/kiri), Indra (Anggota F-PKS MPR/tengah) dan JJ. Rizal (Sejarawan UI/kanan), Senin (29/10), tampil dalam Dialog Pilar Negara di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI Nusantara IV, Jakarta. (timyadi/si)

menempati posisi vital di parpol.”

TAK ADA KETEGASAN

Anggota MPR dari Fraksi PKS Indra SH menyatakan, ke depan diharapkan muncul tokoh muda sebagai pemimpin bangsa. Menurut dia, beberapa waktu terakhir banyak pemuda yang keluar dari peran postif. Hal ini disebabkan, tidak adanya ketegasan arah (blueprint) pembangunan karakter pemuda atau manusia Indonesia. Selain itu, saat ini kaum muda benar-benar dalam kondisi krisis percaya diri dan kehilangan keteladanan.

“Kaum muda tidak bangga dengan budaya negeri sendiri, semua mengagungkan yang dari luar. Sementara, mereka juga tidak punya tokoh yang pantas diteladani, Presiden saja memberi keringanan hukuman narapidana narkoba,” katanya.

Ia mendambakan pemimpin seperti Bung Karno yang dengan lantang menyatakan, berikan aku sepuluh pemuda yang unggul, maka akan kuguncang dunia. “Sekarang dukungan seperti ini tidak ada,” katanya.

(winoto/m-12/m-13/us).

Dahlan Iskan baru sebut 2 nama

✓ Anggota F- PDIP dan Golkar
diduga peras 3 BUMN

JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan baru membeberkan dua oknum DPR yang diduga memeras BUMN. Dua nama

tersebut telah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Dua oknum tersebut berasal dari dua fraksi besar yakni Golkar dan PDIP.

ke Hlm. 11 Klm. 6

DAHLAN ISKAN BARU SEBUT

(Sambungan dari hal 1)

"Mereka minta uang kepada BUMN," kata Dahlan usai memberikan keterangan kepada BK, di DPR, Senin (5/11). Dahlan belum menyebutkan 10 oknum seperti dikatakan selama ini. Soal nama-nama yang dia sebutkan ke BK akan disampaikan secara resmi Rabu depan.

Sementara jumpa pers itu begitu riuh, ratusan wartawan memenuhi lobi di depan ruang BK DPR, sedangkan di luaran terdapat demo puluhan orang mendukung Dahlan mengungkap pemeras BUMN.

Soal dua nama yang diserahkan itu didasarkan pada keterangan tiga direktur BUMN yang mengadu kepadanya. "Dari tiga peristiwa itu saya pikir tiga orang, tapi ternyata orangnya dua. Jadi yang satu peristiwa satu orang, dan yang 2 peristiwa 2 orang," katanya.

Tidak disebutkannya nama-nama oknum DPR itu kepada pers, menurut Dahlan, karena semua sudah diserahkan kepada BK. "Saya tidak mau ada kesan saya bersih-bersih rumah tangga orang lain dari rumah tangga sendiri," katanya.

DIBUKA ANGGOTA BK

Anggota BK dari Fraksi PPP Usman Jafar mengungkapkan dua nama orang yang disebutkan Dahlan, yakni Idris Laena dan Sumaryoto. "Kalian sudah tahulah, itu Idris Laena dan Sumaryoto," katanya tanpa menyebut asal fraksi ataupun partainya.

Kalau ditelusuri, Idris Laena anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar dan Sumaryoto anggota Komisi XI dari FPDIP. Menurut Usman, Sumaryoto disebut Dahlan memeras PT Merpati. Sedangkan Idris memeras PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam.

Ketua BK DPR M Prakosa menyatakan, Dahlan Iskan menyebutkan ada tiga BUMN yang dipalak dua anggota DPR. "Itu terkait penyeritaan modal di BUMN," katanya tanpa menyebutkan ketiga BUMN tersebut.

Menurut Prakosa, dari keterangan Dahlan ada indikasi pelanggaran oleh oknum DPR karena meminta upeti, dan ini akan diselidiki BK. Dia juga memastikan kedua anggota DPR itu akan mendapat sanksi berat jika ter-

bukti memeras BUMN. "Sanksinya bisa pemberhentian sementara ataupun pemecatan," katanya.

Prakosa menjelaskan, soal nama-nama anggota dewan lain yang juga turut kerap meminta upeti kepada DPR, Dahlan sudah menyatakan akan menyampaikannya pada hari Rabu. "Diputuskan, BK minta kelengkapan namanya. Nah, saya akan susulkan lewat tertulis pada hari Rabu," ujar mantan bos PLN itu.

DIDUGA KOORDINATOR

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mendorong Dahlan Iskan untuk tetap melaporkan dua oknum anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun telah melapor ke BK. Kedua orang itu harus diselidiki perannya.

"Bisa saja keduanya sebagai koordinator dalam kasus dugaan pemerasan terhadap BUMN," katanya, Senin.

Ray heran mengapa yang dilaporkan Dahlan itu hanya dua orang karena sebelumnya Dahlan akan melaporkan 10 oknum anggota DPR yang diduga selama ini memeras BUMN. (winoto/m-12/m-13/iohara/us/o).

Dahlan penuhi janji Anggota DPR terbelah

SENAYAN (Pos Kota) – Dahlan Iskan akhirnya memenuhi janjinya kepada Badan Kehormatan (BK) DPR untuk menyerahkan nama-nama tambahan oknum DPR yang diduga memeras BUMN, kemarin. Langkah Menteri Negara BUMN mengadu ke BK itu pun terus menuai pro kontra. Bahkan di kalangan DPR sendiri seolah terbelah dalam menanggapi aksi Dahlan tersebut. ke Hlm. 11 Km. 1

ANGGOTA DPR TERBELAH

(Sambungan dari hal 1)

il Sekjen Partaiokrat, Ramadhan Poengklaim publik berabelakang Dahlan. gi, apa yang dilakukan a mengandung resiko t tinggi dan kalau benar akan habis repolitikanya.

"Saya 15 tahun jadi anak buah Dahlan Iskan. Dia orang yang apa adanya. Cuek, nothing to lose. Dahlan tak meman didikte yang buruk-buruk. Jadi moral publik sejatinya mendukung Dahlan Iskan," kata Ramadhan, Rabu. (Menurutnya, Dahlan adalah sosok yang kebal dari ancaman sana-sini. Jika dia sudah maju, sulit dihentikan. Ia sosok pekerja keras dan benar-benar mau terjun ke lapangan. "Ia disukai rakyat, dan juga jadi salah seorang kader SBY yang baik, cemerlang dan energik," tandasnya.

HARUS JUJUR

Sedangkan dalam pandangan Ketua DPR Marzuki Alie, Dahlan Iskan bukan sosok penakut, karena sudah berani membuka nama-nama oknum DPR yang memeras BUMN. Tapi, Dahlan harus jujur, jangan hanya membuka oknum DPR itu tapi juga membongkar oknum direksi berengsek yang menggerogoti BUMN. "Dahlan harus kerja di bidangnya, benahi itu BUMN yang terus menggerogoti uang negara. Kalau BUMNnya bangkrut, direksinya harus dituntut, jangan dibiarkan enak-enakan," kata Marzuki di DPR, Rabu (7/11). Marzuki meminta Dahlan

untuk kerja sesuai bidangnya, yaitu menyehatkan ratusan BUMN. Menurut dia, Dahlan harus menghindarkan BUMN dari oknum-oknum yang bisanya hanya terus-menerus minta suntikan dana kepada negara. "Bayangkan, itu Merpati terus-terusan minta suntikan modal, beratus-ratus milyar. Sudah berkali-kali, lho," katanya.

TAK SEMBRONO

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta Dahlan Iskan tidak sembrono dalam berbicara. Kalau menunjuk orang melanggar hukum, harus benar-benar ada bukti. "Janganlah orang tidak bersalah didzolimi, pejabat publik jangan sembrono dan sewenang-wenang," katanya.

Menurutnya, kalau pejabat bicarannya sembrono, maka akan mengganggu ketertiban hukum di masyarakat. Akan halnya salah satu inisial yang disebut oleh Dahlan Iskan berasal dari fraksi PDIP, ia mempersilakan kalau yang bersangkutan ingin mengajukan ke ranah hukum. "Kami juga akan mem-back-up," katanya.

MEBURUK

Pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noersy menyatakan yang terjadi antara Dahlan Iskan dengan DPR selama ini makin memperkuat hubungan buruk kedua lembaga negara.

"Kedua belah pihak saling menjatuhkan, saling mencari kelemahannya dan dibuka kepada rakyat. Ini buruk sekali," katanya.

Soal dana dan suap Merpati kepada oknum anggota DPR, Noersy tidak yakin itu terjadi, karena masalahnya belum jelas benar. Dia mengaku sudah bicara dengan direksi lama Merpati, dan dikatakan tidak ada dana suap itu. "Ini harus diuji secara hukum," katanya.

Sementara itu, Warsito Sanyoto, pengacara Sumaryoto, anggota DPR yang termasuk disebut Dahlan, mempersilakan Dahlan membuka apa yang dituduhkan kepada kliennya. Tapi, ia berkeyakinan, Sumaryoto tidak melakukan kesalahan hukum.

DATANG DIAM-DIAM

Dahlan kemarin memenuhi janjinya kepada BK DPR. Namun Dahlan tidak datang sendiri. Ia mengutus Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hamba Samal yang datang diam-diam sore hari.

Wartawan yang dari pagi menunggu di depan ruang BK DPR, baru tahu utusan Dahlan datang ketika Kepala Bagian Sekretariat Badan Kehormatan (BK) Kholidah Indrayana memberi kabar kedatangan utusan Dahlan itu. Kholidah memperlihatkan amplop coklat dari Dahlan. Surat itu baru akan dibuka setelah BK melakukan rapat intern dan rapat tersebut belum dapat ditentukan kapan akan dilaksanakannya.

Menurut Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi, ternyata total yang diduga menjadi pemeras BUMN ada sembilan nama. Sebab, ada satu orang berada di dua peristiwa. "Dan satu orang lagi justru harus dipuji," ujar Faisal menirukan pesan Dahlan, Rabu (7/11). (winoto/m-12/m-13/us/o)

Penistaan agama dibiarkan picu konflik berkepanjangan

SENAYAN (Pos Kota) – Konflik kemanusiaan akibat penistaan agama, pembakaran kuil Budha, kekerasan antar etnis dan antar negara, terus berkobar di berbagai belahan dunia. Untuk itulah, DPR RI memprakarsai pertemuan parlemen dunia untuk mencari solusinya.

“Sejauh ini aksi di tataran elit global belum cukup untuk menyingkirkan pemicu konflik itu. Kini saatnya parlemen dunia ambil bagian,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie kepada wartawan sehubungan akan digelarnya Parliamentary Event on Interfaith Dialogue di Bali, 21-24 November.

Menurutnya, parlemen daeri 16 negara sudah menyatakan ikut. Selain itu juga peserta dari komunitas

berbagai negara.

KESALAHPAHAMAN

Timbulnya masalah penistaan agama ini karena kesalahpahaman antarmanusia dan pandangan yang sempit dan negatif. Untuk itu, Indonesia beberapa waktu yang lalu telah menyerukan protokol internasional antipenistaan agama.

“Masalah seperti film *Innocence of Muslim* yang menistaan agama Islam, itu masalah yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Hal itu seharusnya jangan dibiarkan,” katanya.

Masih banyak hal lain, seperti maslaah etnis muslim Rohingya di Myanmar yang terus menderita karena tidak diakui sebagai warga negara itu, juga kasus-kasus di Timur Tengah, dan lain-

Bongkar kongkalikong butuh waktu lama

☛ Pelaku pintar berkelit

SENAYAN (Pos Kota) – Kongkalikong anggaran bisa terjadi di DPR, tetapi selalu melibatkan pihak pemerintah. Masalahnya untuk membongkar kongkalikong politisi memang lama, karena mereka pintar berkelit.

“Kongkalikong itu selalu terjadi antara DPR dan pemerintah. Tidak mungkin hanya DPR saja yang bernain, pasti dengan oknum dari pemerintah, karena mereka yang pegang anggaran,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudo Husodo, di DPR, Senin (3/12).

Untuk membongkar dan membuktikan secara hukum kongkalikong politisi, prosesnya sulit. Hal itu karena politisi adalah orang partai, dan pintar cari alasan. “Selain itu, politisi punya backing, sehingga oknum politisi itu percaya diri, dan pintar cari alasan,” katanya.

TIDAK ADIL

Meski begitu, Siswono menganggap tidak adil bila masalah ini di generalisir untuk semua anggota DPR. Kekuasaan yang besar memang memberikan peluang orang untuk korupsi. “Tapi

janganlah hal seperti itu di-generalisir.”

BK DPR, kata dia, akan selalu menindaklanjuti laporan-laporan tentang perilaku anggota DPR yang sekiranya melanggar etika, bahkan korupsi. “BK ingin terus memperbaiki citra DPR yang kini sedang krisis kepercayaan, citranya melorot hingga titik nadzir,” katanya.

Pengamat politik Hanta Yuda AR menyatakan, soal kongkalikong anggaran bisa terjadi karena keterlibatan tiga pihak. Masing-masing adalah oknum dari pihak eksekutif (pemerintah), legeslatif (DPR), dan pihak ketiga (mafia).

(winoto/m12/m13/us)